



RENCANA KERJA

KECAMATAN DOLOPO



2023

KECAMATAN DOLOPO

Jln. Raya Dolopo, No. 402
Dolopo, 63174

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dolopo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis KecamatanDolopo yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kecamatan Dolopo. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja KecamatanDolopo disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat KecamatanDolopo Kabupaten Madiun

dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Dolopo. Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dolopo untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Dolopo tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dolopo Januari 2023

CAMAT DOLOPO



HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I'
NIP. 197205241997032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	23
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.3.1 Pelayanan Kecamatan Dolopo.....	26
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Dolopo.....	27
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	27
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.....	28
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023.....	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	44
3.3 Program dan Kegiatan.....	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	52
BAB V PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Dolopo.....	15
Tabel TC-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Madiun.....	18
Tabel 2.2	Sasaran Strategi Kecamatan Dolopo.....	23
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	24
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Madiun	30
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Madiun.....	36
Tabel 3.1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun.....	42
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dolopo.....	44
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	46
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Kecamatan Dolopo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Dolopo memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Kecamatan Dolopo 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Kecamatan Dolopo ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Dolopo sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Kecamatan Dolopo yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Kecamatan Dolopo tahun lalu dan evaluasi hasil Kecamatan Dolopo tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Dolopo; pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Dolopo; perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Dolopo; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Dolopo.

Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Dolopo untuk tahun Ke lima periode Renstra Kecamatan Dolopo 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Kecamatan Dolopo Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Dolopo mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2023, Renstra Kecamatan Dolopo, Renja K/L dan Renja Kabupaten Madiun. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut,

utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kecamatan Dolopo.

Apabila yang disusun merupakan Renja perubahan, maka perlu dicantumkan alasan perubahannya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun ;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 15 Nomor 2008);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 nomor 6)
 33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Dolopo adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Kecamatan

Dolopo dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Kecamatan Dolopo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 2023 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Dolopo adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Kecamatan Dolopo.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Kabupaten
Madiun

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dolopo Kecamatan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2023

Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Kecamatan Dolopo pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.068.460.760,- dengan rincian :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a) Belanja Tidak Langsung | : Rp. 3.499.802.421,- |
| b) Belanja Langsung | : Rp. 560.194.839,- |
| c) Belanja Modal | : Rp. 8.463.500,- |

Yang dialokasikan untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan 6 Program dan 19 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi

sebesar Rp. 3.805.343.441,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93 %.

Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah anggaran Rp. 3.499.802.421,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 3.248.032.021,- atau terealisasi sebesar 92 %.
 - b. Pelaksanaan Umum Perangkat Daerah jumlah anggaran Rp. 135.865.089,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 135.148.760,- atau terealisasi sebesar 99 %
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah anggaran Rp. 5.180.750,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 5.180.750,- atau terealisasi sebesar 100 %
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah anggaran Rp. 84.771.440,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 84.022.333,- atau terealisasi sebesar 99 %
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah anggaran Rp. 115.955.915,-

dengan anggaran terserap sebesar Rp. 110.084.737,- atau terealisasi sebesar 94 %

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik jumlah anggaran Rp. 32.059.600,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 30.774.000,- atau terealisasi sebesar 95 %
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ada 2 kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah anggaran Rp. 37.999.280,- dengan anggaran terserap sebesar Rp. 37.790.900,- atau terealisasi sebesar 99 % 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.889.280,- dengan anggaran terserap Rp. 29.889.280,- atau terealisasi sebesar 100 %.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum jumlah anggaran Rp. 24.677.900,- dengan anggaran terserap Rp. 23.326.000,- atau terealisasi sebesar 94 %
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum jumlah anggaran Rp. 41.361.450,- dengan anggaran terserap Rp. 41.080.450,- atau terealisasi sebesar 99 %
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah anggaran Rp. 34.020.000,- dengan anggaran terserap Rp. 33.000.385,- atau terealisasi sebesar 97 %

Semua program dan kegiatan Kecamatan Dolopo sudah terlaksana semua dan sesuai dengan target yang telah direncanakan, Dan dalam pelaksanaan tersebut juga tetap memperhatikan efisiensi anggaran, namun pencapaian target kinerja tetap dimaksimalkan.

Tabel 2. 1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian
Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Dolopo
Tahun 2023

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	-	
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-
3.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
6		Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-

7		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-
8		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa		
9		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan		
10		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
11		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
12		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
13		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
14		Fasiitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Dolopo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023
Kabupaten Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.Nilai Sakip Kecamatan	81	70,16	-	-	-	-	-	-
		2.Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	80	88,8	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang layak fungsi	100%	93%	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian	Presentase jumlah Dokumen Pemerintahan yang tercukup	100%	100%	-	-	-	-	-	-
	Operasional Kesekretariatan (Covid 19 New Normal)	Persentase kebutuhan Kesekretariatan terpenuhi	100%	92%	-	-	-	-	-	-

				Operasional Kesekretariatan (Covid 19 New Normal)	Persentase kebutuhan Kesekretariatan terpenuhi		92%	-	-	-	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Pelayanan masyarakat yang terpenuhi			-	-	-	-	-	-
				Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Presentase Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	100%	99%	-	-	-	-	-	-
				Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	100%	92%	-	-	-	-	-	-
				Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Presentase Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	99%	-	-	-	-	-	-
				Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	100%	98%	-	-	-	-	-	-
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)									
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	81	70,16	80,01	62,19	77,7%	83	86	86
			2.Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah		80	88,8	77	89,74	116,5%	88	90	90	
7	01	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	13 dokumen	-	-	-	-	13 dokumen	13 dokumen	100%

7	01	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tercukupi	14 dokumen	-	-	-	-	14 dokumen	14 dokumen	100%
7	01	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum perangkat daerah yang tercukupi	12 bulan	-	12 bulan	93%	93%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	01	207	Pengadaann Barang Milik daerah Peninjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	I dokumen	-	1 dokumen	93%	93%	1 dokumen	1 dokumen	100%
7	01	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	12 bulan	-	12 bulan	92%	92%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	12 kali	-	12 kali	100%	100%	12 kali	12 kali	100%
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	02	201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang terlaksana	4 kegiatan	-	4 kegiatan	100%	100%	4 Kegiatan	4 kegiatan	100%

7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
7	01	03	201	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	12 kali	-	12 kali	100%	100%	12 kali	12 kali	100%
7	01	03	202	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terlaksana	12 lembaga kemasyarakatan	-	12 lembaga kemasyarakatan	100%	100%	12 lembaga kemasyarakatan	12 lembaga kemasyarakatan	100%
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	-	100%	99%	99%	100%	100%	100%
7	01	04	201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum	12 kali	-	12 kali	99%	99%	12 kali	12 kali	100%
7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	-	100%	99%	99%	100%	100%	100%
7	01	05	201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 kegiatan	-	1 kegiatan	99%	99%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	05		Fasilitasi Rekomendasi Koordinasi	Fasilitasi Rekomendasi Koordinasi	10 kali	-	10 kali	100%	100%	10 kali	10 kali	100%

			Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis
Kecamatan Dolopo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	79	85,06	107,67 %
	Nilai Sakip Kecamatan	84	70,99	84,51 %

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Unsur Kewilayahan, disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun

No.	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sebelum Perubahan												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			77	77	77	-	-	-	77	-	-
2	Nilai Sakip Kecamatan A			81	81	81	-	-	-	81	-	-

Setelah Perubahan												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			78	79	80	-	83.95	85.06	80	-	
2	Nilai Sakip Kecamatan			83	84	85		62.19	70.99	85	-	
Renstra 2024-2026												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			-	-	-	80	-	-	-	80	
2	Nilai Sakip Kecamatan			-	-	-	80.01	-	-	-	80.01	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Dolopo menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Optimalnya Pelayanan didukung SDM yang memadai, sarana dan prasarana dan komitmen yang kuat dari pelaksana pelayanan.
2. Dukungan stake holder sebagai mitra penyelenggara pelayanan sangat dibutuhkan

2.3.1 Pelayanan Kecamatan Dolopo

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi pelayanan
2. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat ;
3. Melaksanakan Sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada Masyarakat :
4. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di Wilayahnya
5. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya
6. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat

7. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Masyarakat
8. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan ; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan mutu pelayanan

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Dolopo

Beberapa permasalahan dan hambatan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM pelaksana pelayanan/kegiatan di Kantor Kecamatan
- b. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi dari OPD dan stakeholder pendukung tugas dan fungsi Kecamatan.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak”***

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Madiun, yaitu:

- MISI 1 Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun.
- MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.
- MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.
- MISI 5 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan unsur Kewilayahan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-2 Kabupaten Madiun yaitu: Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan , Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya SDM yang memadai
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- c. Perlunya inovasi/terobosan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Komitmen yang kuat dari internal pelaksana
- b. Banyaknya potensi SDM yang bisa ditingkatkan
- c. SOP yang telah mapan dan di implementasikan

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Dolopo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memperkuat Komitmen pelaksana pelayanan untuk memberikan yang lebih baik
- b. Membuat mekanisme kerja/SOP yang praktis sederhana dan tidak berbelit-belit
- c. Mengajukan usulan tambahan anggaran sebagai pendukung kegiatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal RKPD Kecamatan Dolopo dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Kecamatan Dolopo terdiri dari 6 program dan 11 kegiatan, Urusan Pilihan Kecamatan Dolopo terdiri dari - program dan - kegiatan. Serta 1 program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Dolopo

da
ri
....
.

lembar.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Dolopo	Kepuasan ASN terhadap Pelayanan secretariat PD	90	3,936,227,921	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dolopo	Kepuasan ASN terhadap Pelayanan secretariat PD	90	3,940,514,721	
			Nilai Sakip Kecamatan	86				Nilai Sakip Kecamatan	86		
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dokumen	-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	11,560,000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah dokumrenAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 dokumen	3,625,612,421	Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tercukupi	14 Dokumen	3,625,612,421	

c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	40,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	-	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tercukupi	12 bulan	95,895,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	presentase layanan administrasi umum yang tersedia	12 bulan	121,841,100	
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	1 dokumen	10,339,650	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	1 dokumen	60,250,750	
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	12 bulan	85,559,150	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	12 bulan	89,291,150	
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	12 kali	78,821,100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	12 kali	92,282,050	
2	Program Penyelenggara	Kecamatan Dolopo	Persentase Program Penyelenggaraan	100 %	33,747,000	Program Penyelenggaraan	Kecamatan Dolopo	Persentase Program	100 %	33,747,000	

	raan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Dolopo	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang terlaksana	5 Kegiatan	33,747,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Dolopo	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang terlaksana	5 Kegiatan	33,747,000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	54,707,500	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	57,663,400	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Dolopo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	10 kali	43,607,500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Dolopo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	10 kali	45,413,400	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Dolopo	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 lmbg masarakat	11,100,000	Peemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Dolopo	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 lmbg masrakt	12,250,000	
4	Program Koordinasi	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan koordinasi	100%	19,725,000	Program Koordinasi	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan	100%	20,755,000	

	Ketentraman dan Ketertiban Umum		ketentraman dan ketertiban umum			Ketentraman dan Ketertiban Umum		koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Dolopo	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	12 kali	19,725,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Dolopo	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	12 kali	20,755,000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		7,065,000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		50,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	7,065,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	50,000,000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	34,140,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Dolopo	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	34,140,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	10 kali	34,140,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kecamatan Dolopo	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan	10 kali	34,140,000	

	dan Pengawasan Pemerintah n Desa		pemerintahan desa yang terlaksana			Pemerintahan Desa		pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana			
--	---	--	--------------------------------------	--	--	----------------------	--	---	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan /Peningkatan/ Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Kelurahan/Perkotaan/Poros Desa (Kewenangan Sesuai SK)	Belum ada drainase di Rt 13 dan 14 di jalan poros yang menghubungkan Desa Glonggong dan Desa Dolopo	RT 13-14 Dusun Krajan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Kab. Madiun	Kecamatan Dolopo	Ds. Glonggong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan Poros Desa (Kewenangan Sesuai SK Bupati)	Rehabilitasi jalan aspal HRS WC RT 4,5,6,10,12 yang menghubungkan	RT 4,5,6,10,12 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo	Kecamatan Dolopo	Ds. Glonggong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		n Desa Glonggong dengan Desa Candimulyo. kondisi aspal saat ini memerlukan perbaikan.	Kabupaten Madiun, Kab. Madiun				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan sumur P2AT	Lahan pertanian di Jetis membutuhkan sumur agar pengairan bisa lancar, karena irigasi disana alirannya kecil sedangkan lahan sangat luas, dan di lokasi tanah bengkok RT 32 juga membutuhkan sumur.	Dusun Warujereng Desa Glonggong Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun	Kecamatan Dolopo	Ds. Glonggong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Ruas Jalan Kabupaten	Kondisi Jalan Rusak	RT 19 RW 8 Dusun Mojo (Ruas Segulung - Suluk)	Kecamatan Dolopo	Ds. Suluk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talut Penahan Jalan	Longsor dan jalan menyempit	RT 19 RW 8 Dusun Mojo (Ruas Segulung - Suluk)	Kecamatan Dolopo	Ds. Suluk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Air Minum lingkungan Perdesaan (SPAM)	Belum ada sarana penyediaan air minum	RT 1, 2, dan 6 Dusun Sawit Desa Suluk	Kecamatan Dolopo	Ds. Suluk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pertanian	Pengadaan Prasarana Pertanian	Masih Banyak Ditemukan Jalan Usaha Tani yang Sudah Rusak	RT 01 RW 01 Desa Candimulyo (Blok Bekon), Kab. Madiun	Kecamatan Dolopo	Ds. Candimulyo	Dinas Pertanian dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan

Pertanian	Pengadaan Prasarana Pertanian	Masih ditemui Jalan Usaha Tani yang Rusak / tidak memadai	RT 15 RW 04 Desa Candimulyo (Dusun Bulu), Kab. Madiun	Kecamatan Dolopo	Ds. Candimulyo	Dinas Pertanian dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bantuan Bahan Pertanian (Bibit)	Kualitas Bibit Belum Maksimal	RT 03 RW 01 Desa Candimulyo, Kab. Madiun	Kecamatan Dolopo	Ds. Candimulyo	Dinas Pertanian dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum

kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten Madiun

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis
2	Mengembangkan Wiiayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemertaan.	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrasruktur.	Pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan pariwisata.
3	Meningkatkan Sumber daya Manuasia Berkualitas dan berdaya Saing.		Penguatan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana dan lingkungan
4	Revoluasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.		Penguatan bantuan permodalan dan akses kelembagaan ekonomi.

5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Pengembangan pasar rakyat dan pasar digital
6	Membangun Lingkungan Hidup; Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.		Membangun kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan administrasi pemerintahan unsur kewilayahan masuk pada misi ke-2 yaitu, “Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik” Sedangkan, Tujuan dan sasaran Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan Misi ke-2. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dolopo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Hitung	Target pada tahun 2023
1.	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan kecamatan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari Nilai Persepsi Per Usur)/ (Total Unsur yang terisi) x Penimbang	85
		Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public sesuai ketentuan + presentase layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan + Presentase layanan ketentraman dan ketertiban umum +	80

				<p>presentase layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum+ presentase layanan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi 5 dikali 100%</p>	
			<p>Nilai Sakip Kecamatan</p>	<p>Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan setiap tahunnya</p>	<p>85</p>

3.3 Program dan Kegiatan

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2023 disusun sebanyak 6 program sesuai dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, 6 program tersebut yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, (4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, (5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ,(6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Dolopo secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.32
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dolopo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7 01		KECAMATAN								4,085,612,421				4,487,379,401
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,936,227,921				4,327,364,701
7 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,625,612,421				3,988,173,663
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	40 Orang/bulan	100 persen	3,625,612,421	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,988,173,663
7 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								40,000,000				44,000,000
7 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	60 Orang	100 persen	40,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	44,000,000
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								95,895,600				105,578,098
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen	Persentase layanan	Kab. Madiun, Dolopo,	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	4,003,450	LAIN-LAIN PENDAPATA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	4,400,000

				an Bangunan Kantor	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Umum yang tersedia	Semua Kelurahan					N DAERAH YANG SAH		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	4,005,300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	4,400,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	41,182,886	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	45,403,723
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	8,723,964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	9,596,375
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Dokumen	100 persen	1,980,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,178,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	36,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	86,00 nilai 90 nilai	39,600,000

					n Perangkat Daerah										n Perangkat Daerah			
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										10,339,650				15,900,940
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	100 persen	10,339,650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,900,940
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										85,559,150				87,395,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupiah	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	20,009,150	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,290,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupiah	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	65,550,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	72,105,000
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										78,821,100				86,317,000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	8 Unit	100 persen	60,983,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	67,100,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	25 Unit	100 persen	7,468,250	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	8,217,000

					2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	yang Dipelihara											2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	5 Unit	100 persen	10,369,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	11,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							33,747,000			35,200,000				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							33,747,000			35,200,000				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	6 kegiatan	33,747,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100 persen	35,200,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							54,707,500			57,800,500				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							43,607,500			45,600,500				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	12 Lembaga Masyarakat	100 persen	6,926,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	5,251,400
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	13,471,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	14,818,100

					Pemerintahan Umum	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Semua Kelurahan							Pemerintahan Umum			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							34,140,000						37,545,200
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							34,140,000						37,545,200
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, reko mendasi dan koordinasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	100 persen	22,008,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	24,200,000	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitasi, reko mendasi dan koordinasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	100 persen	12,132,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	13,345,200	
TOTAL												4,085,612,421					4,487,379,401	

Sumber: SIPD Kecamatan Dolopo Tahun 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2023. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Dolopo pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2023.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Kecamatan Dolopo berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Kecamatan Dolopo berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Dolopo pada tahun 2023 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023 (Tahun n)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1					2	3	4		5		6		7		8	
7	01	01	2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90		90		90		90			
						Nilai SAKIP PD	85		85		85		85			
7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	3	13.786.700	7	8.736.300	3	8.037.000			13 dok	30.560.000
7	01	01	2	02	administrasi keuangan perangkat daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tercukupi	3	3.625.612.421	3	0	3	0	3	0	12 dok	3.625.612.421

7	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daeah	Jumlah Administrasi umum perangkat daerah yang tercukupi	3	127.024.740	3	81.776.755	6	62.094.657		12bln	270.896.152	
7	01	01	2	07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1	84.864.687	1	8.869.344		0		0	2 unit	93.734.031
7	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	3	167.179.091	3	94.850.000	6	75.050.000			12 bln	337.079.091
7	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	3	94.309.400	3	40.454.500	6	33.081.100			12 kali	167.845.000
7	01	02	2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%		100%		100%				100%	
7	01	02	2	02	Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Penyelenggaraan	3	9.861.000	3	9.861.000	6	14.025.000			12 kgtn	33.747.000

					Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													
7	01	03	2		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahann	100%			100%								100%	
7	01	03	2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3	25.413.400	3	10.000.000	6	10.000.000						12 kali	45.413.400
7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1	438.754.993	1	273.603.193	2	166.222.140						4 pokmas	878.580.326
7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3	6.850.000	3	3.700.000	6	1.700.000						12 lbg kmsytk	12.250.000
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%			100%								100%	
7	01	04	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	3	6.465.000	3	6.365.000	6	7.925.000						12 kali	20.755.000
7	01	05	2		Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase Program Penyelenggaraan	100%			100%								100%	

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2023.

Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Dolopo sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi

positif untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Madiun.

Dolopo Januari 2023
CAMAT DOLOPO



HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720524 199703 1 004